

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 KEADILAN SEBAGAI PILAR PEMILU DEMOKRATIS	1
A. Keadilan dan Negara Hukum Demokratis	1
B. Integrasi Nilai Keadilan dalam Implementasi Hukum Pemilu.....	4
C. Keadilan dalam Konteks Pemilu Indonesia	7
D. Pancasila dan Konstitusi sebagai Landasan Demokratisasi Indonesia.....	16
BAB 2 REGULASI PEMILU INDONESIA: PERSPEKTIF KONSTITUSIONALITAS	21
A. Asas dan Norma Pemilu dalam UUD 1945.....	21
B. Regulasi Pemilu Indonesia, Tinjauan Historis	22
C. Analisis Konstitusional terhadap Evolusi Regulasi Pemilu.....	25
D. Dampak Perubahan Regulasi terhadap Keadilan Pemilu ..	28
BAB 3 PRINSIP KEADILAN DALAM REGULASI PEMILU INDONESIA	39
A. Regulasi Pemilu dan Prinsip Keadilan Menurut UUD 1945 dan Pancasila.....	39
B. Rumusan Prinsip Keadilan dalam Regulasi Pemilu Indonesia	44
C. Keadilan Pemilu dalam Perspektif Pemilu Bermartabat	50

BAB 4 REGULASI KONTRA PRINSIP KEADILAN	59
A. Refleksi terhadap Norma dan Sistem Penyelenggaraan	61
B. Refleksi terhadap Kelembagaan Penyelenggaraan	68
C. Refleksi Penegakan Hukum	71
D. Faktor Penyebab dan Proyeksi	76
BAB 5 REKONSTRUKSI PRINSIP KEADILAN DALAM REGULASI PEMILU	93
A. Analisis Normatif dan Empiris.....	93
B. Rekonstruksi Teoretis Prinsip Keadilan Pemilu	96
C. Usulan Reformasi Regulasi Pemilu.....	101
D. Komparasi terhadap Regulasi Pemilu di Negara Lain.....	105
BAB 6 PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENEGAKAN PRINSIP KEADILAN PEMILU.....	123
A. Partai Politik dalam Sistem Pemilu, Konstitusionalitas dan Legalitas	123
B. Partai Politik dalam Penegakan Prinsip Keadilan Pemilu 126	
C. Partai Politik dan Penyelesaian Sengketa Pemilu: Antara Kepentingan Politik dan Keadilan Proses	130
D. Dinamika Partai Politik dan Integritas Kelembagaan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	133
E. Implikasi Keterlibatan Partai Politik terhadap Independensi Lembaga Pemilu dan Sengketa	135
F. Reformasi Peran Partai Politik, Menjamin Pemilu yang Adil dan Bermartabat	138
BAB 7 REFORMULASI SISTEMIK BERBASIS KEADILAN.....	143
A. Relasi antara Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana	143
B. Penyusunan Undang-Undang Khusus tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	144

C. Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu.....	145
D. Penataan Mekanisme Upaya Hukum Secara Hierarkis dan Terbuka	146
E. Integrasi Asas Keadilan Substantif dalam Penilaian Hak Politik	147
F. Evaluasi Konseptual: Keadilan vs. Legalitas Formal	147
Daftar Pustaka.....	151
Profil Penulis.....	166